



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 3 November 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
 three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education
 Technology, Education Psychology, Curriculum Development,
 Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Penerapan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar: Sebuah Telaah Reflektif

Andi Sri Wahyuni Mumang¹, Andika Marsuki²

^{1,2} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini didasarkan atas kekhawatiran terhadap data yang menunjukkan adanya tren kasus korupsi yang terus meningkat dari tahun ketahun yang dihimpun oleh Transparency International Global Coalition Against Corruption dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran diri dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat diajarkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila mulai pada jenjang sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan tujuan agar mampu mendapatkan, memahami, dan mendeksripsikan berbagai pandangan yang terkait dengan subjek yang dibahas. Dengan demikian dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dari hasil penelitian terdahulu terkait penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila di sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab perbuatan korupsi itu bisa terjadi, ada beberapa bentuk upaya penerapan nilai-nilai anti korupsi yang mendasar yang bisa diajarkan dalam pembelajaran Pancasila di sekolah dasar seperti mengutamakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, mandiri. Namun perlu diketahui bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya sekedar dipahami secara kognitif, tetapi juga diinternalisasikan dalam sikap dan tindakan konkrit. Selain itu, penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di jenjang sekolah dasar membutuhkan keteladanan baik itu guru maupun siswa, diperlukan kerja sama serta komitmen untuk menjamin agar penerapan nilai-nilai antikorupsi dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Nilai-Nilai Anti Korupsi, Pendidikan Pancasila

**Corresponding
 Author:**

mumangandisriwahyuni@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini di era globalisasi yang semakin berkembang pesat, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, seperti terjadinya degradasi moral di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai bentuk penyimpangan perilaku salah satunya

adalah maraknya praktik korupsi yang telah mengakar dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Degradasi moral seperti korupsi menjadi permasalahan bangsa dari tahun ke tahun. Berbagai sanksi telah diberikan namun korupsi justru terus bertambah seiring waktu (Sari et al., 2021). Korupsi telah menjadi sebuah penyakit yang sangat sulit dihilangkan di dunia ini. sehingga, Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari maka akibatnya akan menjadikan masyarakat itu menjadi kacau tidak ada system social yang dapat berlaku baik (Agasi et al., 2020). Di Indonesia korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya merugikan bangsa dan negara (Rosikah & Listianingsih, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Transparency International Global Coalition Against Corruption telah menghimpun data kasus korupsi yang terjadi di dunia dari segi peringkat dan skor. Dimana semakin tinggi peringkat maka semakin banyak kasus korupsi yang terjadi di sebuah negara dan semakin rendah skor maka semakin tinggi kasus korupsi di sebuah negara. Indonesia menurut data tersebut dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2021 sampai 2023 masih berada pada peringkat tinggi dan skor yang termasuk rendah dalam kasus korupsi. Dimana pada tahun 2021 berada diposisi ke-96 dari 180 negara, dengan skor 38 dari 100, pada tahun 2022 berada diposisi ke-110 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100 dan pada tahun 2023 berada diposisi ke-115 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100. Hal ini menandakan bahwa tren kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dan tidak menutup kemungkinan akan meningkat kembali, mengakibatkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan dan masyarakat menunjukkan masih adanya persepsi yang kuat terhadap praktik korupsi diberbagai bidang. (*Transparency International Global Coalition Against Corruption*, 2024).

Dalam dunia pendidikan, korupsi dapat mengakibatkan melemahnya kualitas pendidikan. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi generasi muda, terutama bagi siswa yang merupakan aset berharga dimasa depan dan juga sebagai penerus bangsa. Maka dari itu diperlukan tindakan konkret agar praktik korupsi dapat dicegah dan diberantas sedini mungkin. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Melalui proses pendidikan, seseorang akan dapat menjalani kehidupan yang bermakna, berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, kemanusiaan dan keadilan. nilai-nilai ini tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diinternalisasikan dalam sikap dan Tindakan konkret. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk menanamkan nilai

karakter siswa dalam pencegahan korupsi. Terbentuknya sebuah karakter dan kepribadian yang baik sebenarnya dapat diwujudkan melalui pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila yang menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan yang bertujuan untuk membentuk siswa agar memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya (Nurwardani et al., 2016).

Di sekolah dasar pendidikan Pancasila menjadi arah normative terhadap setiap perilaku siswa. Pada pendidikan Pancasila terdapat Nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan dengan baik dan harus diajarkan dalam bentuk nyata. Menghadapi tantangan ini, penting untuk melakukan penelitian guna memahami bagaimana penerapan nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan sedini mungkin pada pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang sesuai, seperti artikel jurnal akademis, buku, dan situs web yang terpercaya. Sebuah kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori atau hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai (Yusuf & Khasanah, 2019).

Tujuan dari metode ini agar mampu mendapatkan, memahami, dan mendeeksripsikan berbagai pandangan yang terkait dengan subjek yang dibahas dan juga agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dari hasil penelitian terdahulu (Rafly et al., 2025). Langkah-langkah yang digunakan dalam telaah pustaka ini adalah (Saputra, 2025): 1. Peneliti mengumpulkan artikel jurnal ilmiah, buku-buku, dan laporan penelitian serta menelaah situs web resmi yang menghimpun data akurat. 2. Selanjutnya proses analisis yaitu dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai sumber yang ada untuk kemudian ditemukan penelitian yang relevan. Peneliti menganalisis literatur yang telah dipilih dengan mengekstraksi informasi yang relevan, dan

mengevaluasi setiap sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. 3. Sintesis dan penjabaran hasil. Hasil dari analisis pustaka kemudian disintesis menjadi sebuah kerangka konseptual yang dapat berupa review sistematis, review naratif, serta ringkasan yang jelas dari kesimpulan yang diambil dari literatur yang telah dianalisis 4. Interpretasi dan penarikan kesimpulan. Peneliti kemudian melakukan interpretasi terhadap informasi yang disintesis, mengaitkan temuan dengan pertanyaan penelitian, dan menarik kesimpulan yang relevan dari literatur yang telah dipelajari. (Frisnoiry & Chairad, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar dan jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul (Muslimin et al., 2023). Hingga saat ini Tindakan korupsi menjadi tren yang masih terus hangat diperbincangkan dan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit saja tetapi juga sampai pada kalangan masyarakat biasa. Korupsi sebagai masalah sistemik membutuhkan pendekatan yang lebih holistic dan komprehensif. Bukan hanya menanggapi Tindakan tetapi juga melihat faktor-faktor yang menyebabkan korupsi tumbuh subur dalam suatu masyarakat (Silviana et al., 2025). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku korupsi yaitu faktor internal diantaranya sifat atau kepribadian yang rakus, kurangnya akhlak dan moral, iman yang lemah, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup, mengikuti gaya hidup, tidak ingin sengsara dalam bekerja. adapun faktor eksternal diantaranya faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor politik, faktor perilaku masyarakat, faktor hukum (Rosikah & Listianingsih, 2016). Dari berbagai faktor yang ada menunjukkan bahwa begitu lemahnya kesadaran diri seseorang sehingga tidak mampu membedakan mana perilaku koruptif dan yang bukan koruptif.

Menurut narasi laporan hasil pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, guna melihat tren korupsi yang terjadi di Indonesia dalam lima tahun terakhir, Indonesia Corruption Watch melakukan analisis komparatif hasil tabulasi data informasi kasus korupsi pada tahun 2023 dengan empat tahun sebelumnya (2019-2023). Hasilnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini (Anandya & Ramdhana, 2023):



Grafik 1.

Tren Korupsi dalam Lima Tahun (2019-2023)

Berdasarkan grafik di atas, tren korupsi memperlihatkan peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Tahun 2023 menjadi periode yang paling mengkhawatirkan karena terjadi lonjakan signifikan, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, yakni 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Fakta ini menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan secara lebih serius dan berkelanjutan.

Terlebih lagi, fenomena korupsi dapat terjadi di berbagai sektor baik itu dari sosial, ekonomi, termasuk sektor pendidikan yang menunjukkan bahwa tidak ada sektor yang sepenuhnya bebas dari risiko korupsi sehingga berdampak pada kerusakan fondasi pembangunan negara. Di sektor pendidikan sendiri menjadi salah satu sektor yang cukup rentan terjangkau korupsi. Hal ini terbukti dari hasil pemantauan tren korupsi sedikitnya dalam lima tahun terakhir, di mana sektor pendidikan kerap menduduki peringkat lima besar sebagai sektor paling rawan korupsi. Secara statistik, data kasus korupsi sektor pendidikan menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari segi jumlah kasus maupun tersangka dalam lima tahun terakhir.



Grafik 2.

Tren Korupsi Sektor Pendidikan (2019-2023)

Merujuk pada grafik tersebut, bahwa Pada tahun 2023 saja, aparat penegak hukum tercatat menangani sebanyak 59 kasus dengan 130 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka korupsi di sektor pendidikan. Dari tren kasus korupsi pada sektor pendidikan menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dalam pemberantasan korupsi pada ranah pendidikan yang akhirnya berdampak pada melemahnya kualitas pendidikan. Bagaimana mungkin lembaga yang merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter disalahgunakan dengan perbuatan korup. Sehingga yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa yang tidak dapat menerima pendidikan yang layak. Ini adalah faktor lemahnya penanaman nilai-nilai moral dalam diri seseorang yang tidak dibangun sejak kecil. Oleh karena itu penting untuk melakukan upaya pencegahan dari awal salah satunya yaitu melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi. Dalam konteks pendidikan, dapat dimulai dari sekolah dasar yang dilakukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam tingkatan sekolah dasar siswa belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuannya untuk membentuk watak bangsa yang kokoh dan untuk memupuk sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila (Harefa & Daliwu, 2020).

Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha esa, dengan sikap dan perilaku (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta (4) memiliki kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia (Ishaq, 2021).

Pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar mata pelajaran yang membahas tentang konsep Pancasila. Namun dalam pembelajarannya diajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Saputra, 2025). Disamping itu dengan menginternalisasikan di dalamnya nilai-nilai anti korupsi dan diimplentasikan secara kontekstual mampu menjadi strategi dalam pencegahan korupsi. Pada hakikatnya dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kepada siswa akan mendukung pada upaya penguatan karakter yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan tujuan dari Pendidikan pancasila sebagai pendidikan karakter tentu membentuk peserta didik yang memiliki karakter terpuji, sehingga menjadi dasar untuk mereka agar bisa terhindar dan terjerumus pada perilaku koruptif (Nanggala, 2020). Berikut nilai-nilai anti korupsi yang dapat di terapkan kepada peserta didik.



Gambar 1.
Nilai-Nilai Anti Korupsi

Proses penerapan nilai-nilai anti korupsi kedalam pembelajaran Pancasila menjadi langkah preventif untuk menumbuhkan kesadaran awal bagi siswa. Adapun bentuk penerapan yang mendasar yang bisa diajarkan :

1. Kejujuran merupakan usaha sadar yang dapat diajarkan sebagai landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perilaku yang dapat diterapkan yaitu pembiasaan bersikap jujur atau apa adanya dan tidak berbohong seperti siswa tidak melakukan perbuatan mencuri, mengerjakan tugas tanpa mencontek, guru memberi contoh jujur dalam penilaian dan ucapan. Hal itu menunjukkan bahwa sebagai makhluk Tuhan YME ada nilai keimanan dan ketakwaan yang diamalkan (Anwar, 2021).

2. Disiplin menjadi faktor utama dalam meraih kesuksesan. Dengan ketekunan dan konsistensi untuk terus mengasah potensi diri, seseorang akan mampu mengoptimalkan kemampuannya dalam menjalankan setiap tugasnya. Hidup dengan disiplin memberikan banyak manfaat, dimana dapat membantu siswa mencapai tujuan hidup secara lebih efisien serta menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Misalnya mematuhi aturan dan waktu yang ditetapkan, datang tepat waktu ke sekolah, mengikuti tata tertib kelas, guru memberi penghargaan bagi siswa yang disiplin. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya. Semua itu merupakan nilai kemanusiaan yang beradab dan menjadi dasar menolak segala bentuk korupsi. (Yenik et al., 2024).
3. Tanggung jawab merupakan perilaku yang selalu menjalankan tugas yang dipercayakan dengan baik serta menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas. Bertanggung jawab berarti sikap seseorang yang berani menerima dan menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukannya. Individu yang memiliki kepribadian matang serta memahami jati dirinya akan menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini bertujuan untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Adapun indikator penerapan yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh misalnya siswa menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Perilaku yang selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dan menyelesaikan setiap tugas dengan penuh kesungguhan serta rasa tanggung jawab, akan menghindarkan dari segala bentuk yang merugikan orang lain (Cahyani et al., 2020).
4. Keadilan adalah perbuatan yang menempatkan suatu posisi pada tempatnya sama berat, tidak memihak, serta memperlakukan semua pihak secara proporsional. Penanaman sikap adil dapat menjadikan peserta didik tidak membedakan sesuatu (Nestiariana & Ria, 2023). Contoh penerapannya dapat berupa guru memberi kesempatan bicara kepada semua siswa, tidak pilih kasih dalam pembagian tugas, bermain peran tentang keadilan sosial. penanaman nilai keadilan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diperlakukan setara. Hal ini juga menjadi bekal penting agar mereka kelak tumbuh menjadi warga negara yang menjunjung tinggi kebenaran, menolak ketidakjujuran, serta terhindar dari perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Keberanian merupakan sikap seseorang yang menjunjung kebenaran, mengakui kesalahan yang diperbuat, bertanggung jawab atas tindakannya, serta tegas menolak segala bentuk kejahatan dan ketidakjujuran. Sikap berani perlu diajarkan kepada siswa agar mereka dapat tumbuh dengan karakter yang berintegritas. Adapun yang dapat diterapkan misalnya siswa berani bertanya dan menyampaikan pendapat dalam diskusi, guru mencontohkan sikap berani menolak ketidakadilan, bermain peran tentang keberanian menolak kecurangan. Sehingga menghilangkan rasa takut akan hal-hal yang menyimpang dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif (Taja & Aziz, 2016).
6. Kepedulian merupakan sikap yang ditunjukkan seseorang dalam bentuk empati kepada orang lain. Untuk dapat menerapkan sikap peduli dapat dilakukan melalui kasih sayang terhadap teman, guru, dan sesama di lingkungan sekolah. Bentuk nyata kepedulian dapat diwujudkan dengan membantu teman yang mengalami kesulitan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana bagi korban bencana, kegiatan gotong royong membersihkan kelas, membantu teman yang kesulitan belajar, mengadakan kegiatan berbagi untuk teman yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama (Suciptaningsih, 2014).
7. Kerja keras adalah perilaku yang senantiasa mengerjakan setiap tugas dengan tekun serta menjauhi cara-cara instan demi mencapai hasil yang diinginkan. Seseorang yang bekerja keras tidak mudah menyerah dalam belajar dan berusaha mencapai tujuan. Wujud penerapannya dapat berupa siswa berlatih mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan tekun, mengerjakan proyek kelompok hingga selesai, guru menanamkan semangat pantang menyerah (Ma'as, 2014).
8. Kesederhanaan perilaku yang tidak berlebihan dalam menggunakan atau memiliki sesuatu, serta lebih mengutamakan tujuan dan manfaat dari benda tersebut daripada sekadar memenuhi keinginan pribadi (Lu'mu & Mantasia, 2016). Contohnya dapat dilakukan dengan perbuatan tidak hedonisme, mengajarkan nilai hidup hemat dan tidak boros, guru memberi contoh gaya hidup sederhana. Sikap tersebut melatih peserta didik agar lebih hidup sederhana.
9. Kemandirian merupakan sikap tidak bergantung pada orang lain dan berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan usaha sendiri (Nova & Widyastuti, 2019). Sikap ini mencerminkan kemandirian dalam bertanggung jawab atas diri sendiri, baik dalam hal belajar, bekerja, maupun menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Adapun bentuk penerapannya seperti mengerjakan tugas tanpa meniru, tidak bergantung pada orang lain, guru

memberi pujian bagi siswa yang mandiri. Dalam konteks pendidikan pancasila, menanamkan nilai kemandirian berarti membantu siswa menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup dengan cara yang bermartabat.

Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di jenjang sekolah dasar membutuhkan keteladanan baik itu guru maupun siswa, diperlukan kerja sama serta komitmen bersama untuk menjamin agar penerapan nilai-nilai antikorupsi dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan pembelajaran yang tepat serta terciptanya lingkungan sekolah yang mendukung budaya akademik positif, nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan secara efektif kepada siswa sekolah dasar. Melalui upaya tersebut, diharapkan tumbuh pribadi siswa yang memiliki karakter antikorupsi yang kuat.

KESIMPULAN

Pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar menjadi wahana penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, keadilan, keberanian, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga perlu diinternalisasikan dalam sikap dan tindakan nyata melalui pembiasaan dan keteladanan guru di lingkungan sekolah. Melalui penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, siswa dapat dibentuk menjadi pribadi yang berintegritas, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, kolaborasi seluruh warga sekolah diperlukan agar proses penanaman nilai-nilai antikorupsi berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, nilai-nilai antikorupsi yang diterapkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk membangun generasi muda yang memiliki moral kuat, karakter luhur, dan kesadaran tinggi untuk menolak segala bentuk penyimpangan serta perilaku koruptif demi terwujudnya bangsa Indonesia yang berintegritas dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, P. A., Sitorus Saeputri, N. A. A., Prasalengga, & Prasalengga, A. (2020). *Startegi Pemberantasan Korupsi*. Pustaka Rumah C1nta.
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Hasil_Pemantauan_Tren_Korupsi_Tahun_2023.pdf). Diakses Tanggal 8

Agustus 2025

- Anwar, C. (2021). Strategi Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Journal of Social Science and Education*, 2(2), 195–202.
- Cahyani, T. D., Danawati, M. G., & Kurniawan, K. D. (2020). Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi d i SD ' Aisyiyah dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang. *Borobudur Journal on Legal Services*, 1(2), 46–58.
- Frisnoiry, S., & Chairad, M. (2024). TRANSFORMASI PENDIDIKAN MENUJU LITERASI DALAM ERA GLOBALISASI: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Pendidikan Matematika Malikussaleh*, 4, 53–63.
- Harefa, A., & Daliwu, S. (2020). *Teori PENDIDIKAN PANCASILA yang terintegrasi PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*. Lutfi Gilang.
- Ishaq. (2021). *PENDIDIKAN PANCASILA*. KENCANA.
- Lu'mu, T., & Mantasia, R. (2016). *IMPLEMENTASI MEDIA PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI BERBASIS GENDER UNTUK MENANAMKAN NILAI-NILAI*.
- Ma'as, S. (2014). MODEL PENANAMAN NILAI ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Universitas Islam Sultan Agung*. <https://doi.org/DOI: 10.30659/PENDAS.1.2.107-117>
- Muslimin, D., Kusumawati, I., Asman, Mustanir, A., Siswantara, Y., Rafid, R., Agustin, R. W., Saefulloh, A., Safrina, Hendrayady, A., Suryani, E., & Aprianti, K. (2023). *Pendidikan anti korupsi*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Nanggala, A. (2020). INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARANEGARAAN. *JURNAL GLOBAL CITIZEN*, 1.
- Nestiariana, & Ria. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 28–31.
- Nova, R. D. D., & Widyastuti, N. (2019). PEMBENTUKAN KARAKTER MANDIRI ANAK MELALUI KEGIATAN NAIK TRANSPORTASI UMUM. *Jurnal Comm-Edu*, 2, 113–118.
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Kuswanjono, A., Munir, M., Mustansyir, R., Nurdin, E. S., Mulyono, E., Prawatyani, J. S., Anwar, A. A., Evawani, Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). *Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Rafly, D., Aminah, S., Apriani, I. T., & Nugraha, T. A. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Masyarakat Multikultural : Upaya Memepertahankan Identitas Bangsa di Era Globalisasi yang Semakin Kompleks. *JHN : Jurnal Hukum Nusantara*, 1, 125–132.

- Rosikah, D. C., & Listianingsih, M. D. (2016). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Saputra, E. E. (2025). Membangun Budaya Anti-Korupsi melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Cakrawala Pembelajaran*, 1, 1-13.
- Sari, V. K., Akhwani, Hidayat, M. T., & Rahayu, D. W. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Antikorupsi melalui Ekstrakurikuler dan Pembiasaan di Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*, 5(4), 2106-2115.
- Silviana, A., Jafar, R. A., Iskandar, S., Rifqi, A., Fatma, M., Dewi, S., Putriyana, A., Ganjarjati, I. N., & Sari, E. W. (2025). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*. CV. Gita Lentera.
- Suciptaningsih, O. A. (2014). PERAN PENDIDIKAN DASAR DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI. PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *PROSEDING SEMINAR NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*.
- Taja, N., & Aziz, H. (2016). MENINGTEGRASIKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, VIII, 1-14.
- Transparency International Global Coalition Against Corruption. (2024). <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>. Diakses Tanggal 7 Agustus 2025
- Yenik, P., Hasibuan, S. A. P., & Budiono, T. S. (2024). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademik*, 2(1), 24-30.
- Yusuf, A. ., & Khasanah, U. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (p. 332).